



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG

FINAL

RENCANA KERJA PERUBAHAN

TAHUN

2020

**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KB
(DP3APPKB)**



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jl. Kayangan No. 265 Telp. (0484) 21178 Watansoppeng

Watansoppeng, 8 Januari 2021

Kepada,

Yth. BUPATI SOPPENG

Cq. KEPALA BAPPELITBANGDA

di-

Watansoppeng

SURAT PENGANTAR

Nomor : 045.2/ 27/ DP3APPKB /I /2021

NO	JENIS SURAT YANG DIKIRIM	BANYAKNYA	KETERANGAN
1.	Rencana Kerja (Renja) Perubahan SKPD Tahun 2020	1 (Satu Exp)	Dikirim Dengan Hormat Untuk Diproses Selanjutnya.

An. **KEPALA DINAS**
Kasubag Perencanaan dan Pelaporan



SURAHMY NURDIN, S.Pt

Pangkat : Penata

Nip. 19790908 200801 2 018

Diterima pada Tanggal: 8/01/2021

Yang Menerima,

HUSNUL KHATIMAH



PEMERINTAH KABUPATEN SOPPENG
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
Jln.Kayangan No. 256Telp. (0484) 21178 Watansoppeng 90811

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA KABUPATEN SOPPENG

NOMOR : 32/DP3AP2KB/VIII/2020

TENTANG
PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2020
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SOPPENG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SOPPENG

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penjabaran Perubahan RKPD Kabupaten Soppeng Tahun 2020, sesuai Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng Tahun 2020;

b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana tentang Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 SKPD Kabupaten Soppeng.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD, dan Informasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4693);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2020;
11. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 7 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 10 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Propinsi Sulawesi Selatan Nomor 283);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kabupaten Soppeng Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 80);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 10 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 2020;
18. Peraturan Bupati Kabupaten Soppeng Nomor 43/PERBUP/XII/ 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Kabupaten Soppeng;
19. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
20. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 91 Tahun 2017 tentang nomenklatur Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
21. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 75 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Soppeng Nomor 8 tahun 2017 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
22. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 86 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020;
23. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 39 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2021;
24. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 46 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2021;
25. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 54 tahun 2019 tentang Penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;

MEMUTUSKAN :
Menetapkan : PERUBAHAN RENCANA KERJA TAHUN 2020
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN
ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANA KABUPATEN SOPPENG

Pasal 1

Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, yang selanjutnya disebut Perubahan Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahunnya itu tahun 2020.

Pasal 2

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini.

Pasal 3

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Watansoppeng Kabupaten Soppeng Provinsi Sulawesi Selatan pada Tanggal 24 Agustus 2020.

Ditetapkan di Watansoppeng
Pada Tanggal : 24 Agustus 2020

KEPALA DINAS



Hj. A. HUSNATI, S.Sos, MM

Pangkat : Pembina

Nip : 19690227 199209 2001



PERUBAHAN RENCANA KERJA

**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020**

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas rahmat dan karunia-Nya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng Tahun 2020.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Tahun 2020 ini disusun berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah, dan juga mengacu pada Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2020 dan RENSTRA Tahun 2016 – 2021.

Perubahan Rencana Kerja (RENJA) merupakan Dokumen Perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah yang memuat kebijakan dan Program atau Kegiatan dalam satu tahun dan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kegiatan dan Anggaran (RKA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng Tahun 2020 dan untuk mereview hasil Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Triwulan II dan perkiraan capaian tahun berjalan, dan melalui penyusunan Rencana Kerja SKPD Tahun 2020 ini diharapkan dapat memberikan informasi tentang kejelasan dan manfaat Program atau Kegiatan yang direncanakan bagi Pemerintah dan Masyarakat.

Kami menyadari bahwa didalam penyusunan Rancangan Perubahan Rencana Kerja (RENJA) 2020 ini masih terdapat banyak kekurangan baik yang berkaitan dengan teknik perumusan, penulisan maupun penyajiannya, namun demikian besar harapan kami agar Perubahan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 ini dapat bermanfaat bagi semua, dan dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi para pengambil keputusan maupun penentu kebijakan.

Watansoppeng, Juli 2020

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SOPPENG**



Hj. A. HUSNIATI, S.Sos, MM
Nip. 19690227 199209 2 001



PERUBAHAN RENCANA KERJA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	7
1.4. Sistematika Penulisan	8
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH	
TAHUN LALU	10
2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Triwulan II Tahun 2020 dan Capaian Renstra Tahun 2016-2021	10
2.2. Analisis Kinerja Pelayanan DP3APPKB	23
2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DPPKB	27
2.4. Review terhadap rancangan awal RKPD	32
2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat	39
BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH	43
BAB IV PENUTUP	52



PERUBAHAN RENCANA KERJA

**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020**

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Laporan Realisasi Anggaran dan Belanja Dinas Pemberdayaan Perempuan perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Triwulan II Tahun 2020	10
Tabel 2.2	Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan renja SKPD dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Triwulan II Tahun 2020.....	14
Tabel 2.3	Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng	24
Tabel 2.4	Review Terhadap RKPD Tahun 2020	33
Tabel 2.5	Review Terhadap Usulan Program dan Kegiatan Dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020	39
Tabel 3.1	Perubahan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021.....	45



PERUBAHAN RENCANA KERJA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Bagan Alur Rancangan Renja SKPD Kab/Kota	2
Gambar 1.2	Bagan Alur Hubungan Perencanaan dan Penganggaran	4
Gambar 1.3	Bagan Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Daerah.....	4



PERUBAHAN RENCANA KERJA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020

BAB I PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng Tahun 2020 merupakan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan pada Tahun 2020 yang merupakan penjabaran dari Renstra.

Renja memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang berpedoman pada review Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng Tahun 2016 - 2021 dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2020.

Penyusunan Renja juga menyelaraskan tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan yang ditetapkan dalam rencana kerja perangkat daerah di tingkat provinsi dan rencana strategis kementerian atau lembaga pemerintah non kementerian yang terakit untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional.

1.1.1 Pengertian Renja

Rencana kerja ini merupakan suatu aktivitas analisis dan pengambilan keputusan di masa yang akan datang untuk menetapkan tingkat kinerja yang diinginkan di masa yang akan datang. Sehingga pokok dari perencanaan kinerja adalah penetapan tingkat capaian kinerja yang dinyatakan melalui ukuran kinerja atau indikator kinerja dalam rangka pencapaian sasaran atau target yang telah ditetapkan.

Renja SKPD merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk periode satu tahun. Undang-undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah telah mewajibkan setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk Menyusun Rencana Kerja (Renja) SKPD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menerjemahkan perencanaan strategis lima tahunan yang dituangkan dalam Renstra SKPD kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional.



PERUBAHAN RENCANA KERJA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020

1.1.2 Proses Penyusunan Renja

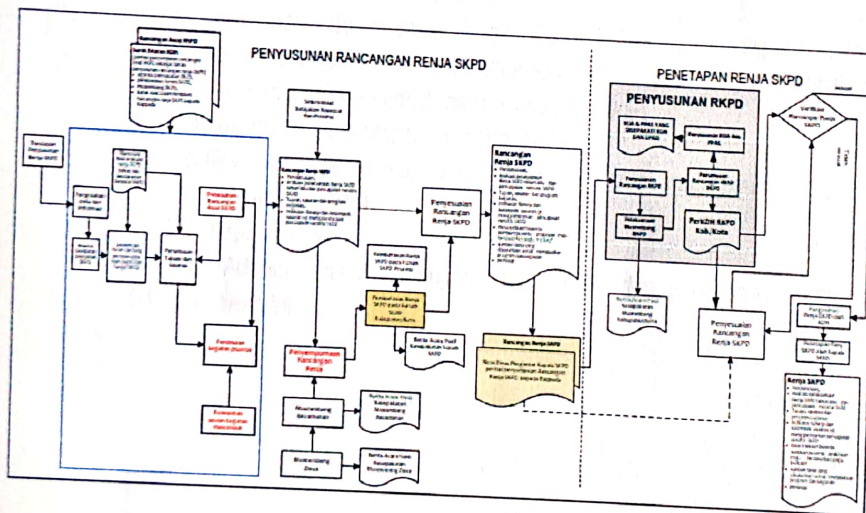
Dalam prosesnya, penyusunan rancangan Renja SKPD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam rancangan awal RKPD. Oleh karena itu penyusunan rancangan Renja SKPD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan rancangan awal RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting SKPD, evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra SKPD.

Tahapan penetapan rancangan akhir Rencana Kerja SKPD dilakukan dengan pengesahan oleh Kepala Daerah, selanjutnya Kepala SKPD menetapkan Renja SKPD untuk menjadi pedoman di Lingkungan SKPD dalam menyusun program dan kegiatan prioritas SKPD pada tahun anggaran berkenaan.

Prinsip Penyusunan :

1. Substansi Renja SKPD merupakan perbaikan dari materi Rancangan Renja SKPD yang disesuaikan dengan Peraturan Kepala Daerah RKPD
2. Program dan kegiatan yang direncanakan memuat tolok ukur kinerja keluaran, target capaian program/kegiatan, target keluaran kegiatan, total dana yang diperlukan kegiatan.
3. Renja SKPD merupakan dokumen resmi program dan kegiatan SKPD yang akan dilaksanakan dalam tahun rencana dan merupakan acuan dalam penyusunan RKA SKPD setelah memperhatikan nota kesepakatan Kebijakan Umum APBD (KUA), serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

Gambar 1.1 Bagian Alur Rancangan Renja SKPD Kab/Kota





PERUBAHAN RENCANA KERJA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020

Adapun tahapan persiapan penyusunan Renja yang dilakukan adalah sebagai berikut:

- a. Persiapan Penyusunan Renja
 - Pembentukan Tim Penyusun Renja;
 - Orientasi mengenai Renja;
 - Penyusunan Agenda Kerja Tim Renja;
 - Pengumpulan Data dan Informasi.
- b. Pengolahan Data dan Informasi

Tahap pengolahan data dan informasi bertujuan untuk menyajikan seluruh kebutuhan data dari laporan hasil analisis menjadi informasi yang lebih terstruktur, sistematis dan relevan bagi pembahasan tim dan pihak-pihak terkait di tiap tahap perumusan penyusunan rancangan Renja
- c. Tahap Perumusan Rancangan Renja
 - Pengolahan Data dan Informasi;
 - Analisis gambaran pelayanan SKPD;
 - Mereview hasil evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu berdasarkan Renstra SKPD;
 - Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD;
 - Telaah terhadap rancangan awal RKPD;
 - Perumusan tujuan dan sasaran;
 - Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
 - Perumusan kegiatan prioritas;
 - Penyajian awal dokumen rancangan Renja SKPD;
 - Penyempurnaan rancangan kerja SKPD;
 - Pembahasan Forum SKPD; dan
 - Penyesuaian dokumen rancangan Renja SKPD sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan Tahun rencana dengan mempertimbangkan arah dan kebijakan umum pembangunan daerah.
- d. Penyajian dan penyampaian rancangan Renja
- e. Verifikasi dan penyempurnaan rancangan renja yang mengacu pada Rancangan Akhir RKPD
- f. Penetapan Renja

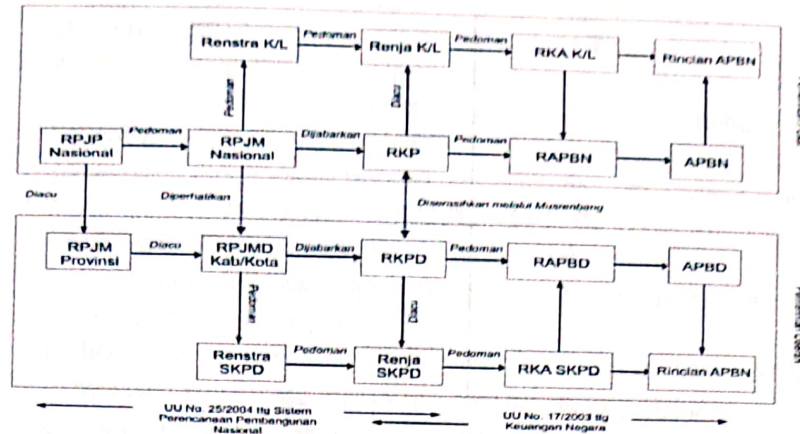
Adapun skema hubungan perencanaan dan penganggaran dapat dilihat dibawah ini:



PERUBAHAN RENCANA KERJA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020

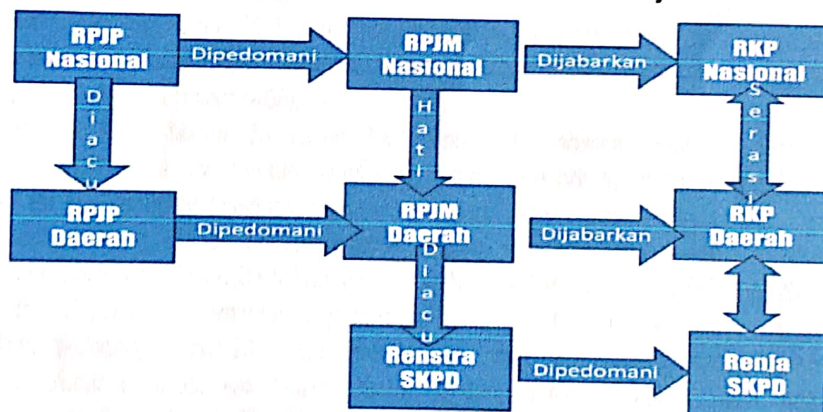
Gambar 1.2
Bagan Alur Hubungan Perencanaan dan Penganggaran



1.1.3 Keterkaitan Antara Renja SKPD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Rencana Kerja SKPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan tahunan di lingkup Satuan Kerja merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan. Seluruh dokumen tersebut merupakan bagian dari system perencanaan pembangunan dan merupakan sebuah proses yang sistematis dan terpadu, maka seluruh tahapan dan dokumen-dokumen yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang kuat antara satu dengan yang lainnya.

Gambar 1.3
Keterkaitan Renja dengan Dokumen Perencanaan lainnya





PERUBAHAN RENCANA KERJA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020

1.1.4 Tindak Lanjut Renja dengan Proses Penyusunan RAPBD

Renja SKPD menterjemahkan, mengoperasionalkan RKPD ke dalam Program dan kegiatan SKPD sedemikian rupa sehingga berkontribusi kepada pencapaian tujuan dan capaian program RKPD secara keseluruhan dan tujuan strategis jangka menengah yang tercantum dalam Renstra SKPD

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran SKPD Berdasarkan nota kesepakatan yang berisi KUA dan PPAS, TAPD menyiapkan rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA SKPD sebagai acuan kepala SKPD dalam menyusun RKA-SKPD. Adapun Rancangan surat edaran kepala daerah tentang pedoman penyusunan RKA-SKPD mencakup:

- a. PPAS yang dialokasikan untuk setiap program SKPD berikut rencana pendapatan dan pembiayaan;
- b. Sinkronisasi program dan kegiatan antar SKPD dengan kinerja SKPD berkenaan sesuai dengan standar pelayanan minimal yang ditetapkan
- c. Batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD
- d. Hal-hal lainnya yang perlu mendapatkan perhatian dari SKPD terkait dengan prinsip-prinsip peningkatan efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabilitas penyusunan anggaran dalam rangka pencapaian prestasi kerja; dan
- e. Dokumen sebagai lampiran meliputi KUA, PPA, kode rekening APBD, format RKA SKPD, analisis standar belanja dan standar satuan harga.

1.2 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4406);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);

APR 2020



PERUBAHAN RENCANA KERJA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2016 Nomor 114);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Kerja Pembangunan Daerah Tahun 2017;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2018 tentang Kebijakan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah tahun 2019;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 4 Tahun 2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Pemerintah Kabupaten Soppeng;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Rencana Jangka Panjang Daerah Tahun 2005 – 2025;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 9 Tahun 2018 Tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun Nomor 2016 Nomor 5 Tambahan lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 99), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5 Tahun 2019 tentang Peraturan Atas Peraturan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 5



PERUBAHAN RENCANA KERJA

**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020**

- Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Soppeng Tahun 2019 Nomor 5, Tambahan Lembaran Kabupaten Soppeng Nomor 125);
20. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 43/PER-BUP/XII/2014 tentang Perencanaan dan Penganggaran Partisipatif Kabupaten Soppeng;
 21. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 62 Tahun 2016 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng;
 22. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 91 Tahun 2017 Tentang Nomenklatur Jabatan pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Soppeng;
 23. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 33 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2019;
 24. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 79 Tahun 2018 Tentang Nomenklatur Jabatan fungsional dan Jabatan Pelaksana di Lingkungan pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng;
 25. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 54 Tahun 2019 tentang Penyesuaian Rencana Strategis Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng Tahun 2016 – 2021;
 26. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 29 tahun 2019 tentang Rencana kerja pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2020;
 27. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 37 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2019.
 28. Peraturan Bupati Soppeng Nomor 40 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, tugas dan fungsi pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2020 DP3APPKB Kabupaten Soppeng ini memuat informasi mengenai sasaran yang ingin dicapai pada tahun 2020, serta kelompok indikator kinerja dan rencana capaiannya. Selain itu termuat pula keterangan mengenai penjelasan keterkaitan kegiatan dengan sasaran, kebijakan dengan program-programnya, serta keterkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah Lainnya.

Dengan tersedianya seluruh informasi diatas dalam Rencana Kerja Tahun 2020 maka diharapkan Dokumen Rencana Kerja ini akan menjadi jembatan yang menghubungkan rencana jangka menengah dan rencana jangka panjang, selain itu dengan Rencana Kerja Tahun 2020 ini diharapkan DP3APPKB akan lebih menajamkan rangkaian perencanaan hingga penganggaran, sehingga sumber-sumber yang tersedia untuk implementasi berbagai macam rencana akan menjadi lebih optimal.



PERUBAHAN RENCANA KERJA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020

Maksud

Penyusunan Dokumen Perubahan Renja Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai pedoman penyusunan perencanaan anggaran program dan kegiatan pembangunan yang selanjutnya akan dituangkan ke dalam RKA Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng.

Tujuan

Adapun tujuan kegiatan penyusunan Rancangan Akhir Perubahan Renja Tahun 2020 Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

1. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Tahun 2020 pada Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
2. Untuk memberikan arahan dan pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga untuk mencapai sasaran dan tujuan yang ditetapkan;
3. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender, Peningkatan kualitas Keluarga dan Perlindungan anak, Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Pada dasarnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 ini, memuat Program-program dan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi DP3APKB Kabupaten Soppeng. Sistematika penyajian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 diuraikan secara singkat dalam masing-masing bab adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bagian ini dijelaskan mengenai gambaran umum penyusunan rancangan Renja SKPD agar substansi pada bab-bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja Mengemukakan pengertian ringkas tentang Renja SKPD, proses penyusunan Renja SKPD, keterkaitan antara Renja SKPD dengan dokumen RKPD, Renstra SKPD, dengan Renja K/L dan Renja provinsi/Kabupaten/kota, serta tindak lanjutnya dengan proses penyusunan RAPBD.

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang kewenangan SKPD, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran.



PERUBAHAN RENCANA KERJA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat Penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja SKPD.

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja SKPD, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan RENJA DP3APPKB Triwulan II Tahun 2020 dan Capaian RENSTRA DP3APPKB Periode 2016-2021

Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja DP3APPKB Triwulan II Tahun 2020 dan perkiraan pencapaian tahun 2020, mengacu pada APBD tahun berjalan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target DP3APPKB berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja DP3APPKB tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan DP3APPKB

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan SKPD berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditentukan dalam permendagri Nomor 86 Tahun 2017.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi DP3APPKB

Berisikan uraian mengenai : perkembangan tingkat kinerja pelayanan DP3APPKB, permasalahan dan hambatan yang dihadapi, dampak terhadap pencapaian Visi, dan Misi kepala daerah, tantangan dan peluang dalam peningkatan pelayanan, formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk tahun rencana yang akan datang.

2.4 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai : membandingkan antara RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses perbandingan dilakukan, penjelasan temuan dari hasil perbandingan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Berisikan uraian mengenai hasil kajian terhadap program atau kegiatan yang diusulkan para stakeholders yang terkait langsung dengan pelayanan.

BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

1. Program/Kegiatan
2. Indikator Kinerja
3. Kelompok Sasaran
4. Lokasi kegiatan
5. Kebutuhan Dana Indikatif
6. Sumber Dana

BAB IV PENUTUP

Berisikan Catatan Penting yang perlu mendapatkan perhatian, kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.



PERUBAHAN RENCANA KERJA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Triwulan II Tahun 2020 dan Capaian Renstra Tahun 2016-2021

Pada bagian ini akan diuraikan mengenai review hasil evaluasi pelaksanaan Renja DP3APPKB Triwulan II Tahun 2020 dan perkiraan pencapaian kinerja Tahun 2020, serta progress pencapaian kinerja dalam Renstra Periode 2016-2021 sehingga dapat teridentifikasi sampai sejauh mana DP3APPKB melaksanakan program dan kegiatannya. Untuk Pelaksanaan Rencana Kinerja Tahun 2020 pada umumnya realisasi program/kegiatan telah tercapai sesuai dengan target kinerja yang telah direalisasikan.

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3APPKB) pada Tahun Anggaran 2020 mendapatkan alokasi anggaran belanja sebesar Rp 7.840.847.965,00 dengan yang terdiri dari Belanja Tidak Langsung Rp 2.680.928.215,00 dan Anggaran Belanja Langsung sebesar 5.159.919.750,00 membiayai pelaksanaan 7 program serta 52 kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Realisasi belanja berdasarkan Program dan kegiatan Lingkup Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Soppeng tergambar pada Tabel berikut ini

Tabel 2.1
Daftar Realisasi Belanja Berdasarkan Program dan kegiatan DP3APPKB Sampai
Dengan Triwulan II Tahun Anggaran 2020

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi s.d Triwulan II	Sisa Anggaran s.d Triwulan II	Ket
	2	3	4	5	6
1.2.08.01.00.00.5	Belanja	7.840.847.965.00	2.764.434.102.00	4.652.852.663.00	37.27
1.2.08.01.00.00.5.1	Belanja Tidak Langsung	2.680.928.215.00	1.301.686.180.00	1.379.242.035.00	48,55
1.2.08.01.00.00.5.1.1	Belanja Pegawai	2.680.928.215.00	1.301.686.180.00	1.379.242.035.00	48,55
1.2.08.01.01.01.5.2	Belanja Langsung	5.159.919.750,00	1.462.747.922,00	3.273.610.628,00	
1.2.02.01.05	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggaraan Urusan	871.058.050.00	314.301.572.00	452.491.478.00	
1.2.02.01.05.01	Penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik	66.340.200.00	17.102.467.00	49.237.733.00	25.78
1.2.02.01.05.03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	19.950.000.00	2.695.455.00	17.254.545.00	13.51
1.2.02.01.05.05	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	8.800.000.00	3.600.000.00	5.200.000.00	40.91



PERUBAHAN RENCANA KERJA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi s.d Triwulan II	Sisa Anggaran s.d Triwulan II	Ket
1	2	3	4	5	6
2.02.2.02.01.05.06	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	1.500.000,00	1.500.000,00	0,00	100,00
2.02.2.02.01.05.09	Penyediaan bahan logistik kantor	1.980.000,00	495.000,00	1.485.000,00	25,00
2.02.2.02.01.05.10	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah serta kedinasan lainnya	180.000.000,00	108.217.200,00	29.182.800,00	78,78
2.02.2.02.01.05.11	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	384.250.000,00	117.679.400,00	254.070.600,00	31,66
2.02.2.02.01.05.18	Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor	1.000.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.02.01.05.34	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	5.000.000,00	4.995.500,00	4.500,00	99,91
2.02.2.02.01.05.36	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	157.232.850,00	32.846.550,00	94.506.300,00	25,79
2.02.2.02.01.05.40	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	10.000.000,00	4.350.000,00	1.400.000,00	75,65
2.02.2.02.01.05.46	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	15.000.000,00	14.850.000,00	150.000,00	99,00
2.02.2.02.01.05.63	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	20.000.000,00	5.970.000,00	0,00	100,00
2.02.2.02.01.06	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah	17.025.000,00	1.531.200,00	10.593.800,00	12,63
2.02.2.02.01.06.10	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	6.125.000,00	1.531.200,00	2.493.800,00	38,04
2.02.2.02.01.06.11	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00
2.02.2.02.01.06.12	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	2.800.000,00	0,00	2.800.000,00	0,00
2.02.2.02.01.06.13	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	6.100.000,00	0,00	3.300.000,00	0,00
2.02.2.02.01.01	Program Pengendalian Penduduk	39.874.400,00	0,00	22.090.000,00	0,00
2.02.2.02.01.01.02	Sosialisasi kajian kebijakan pengendalian penduduk bagi Pengelola Program KB dan Organisasi Kemasyarakatan	4.221.100,00	0,00	0,00	
2.02.2.02.01.01.04	Pengolahan data dan informasi program KB	10.440.000,00	0,00	10.440.000,00	0,00
2.02.2.02.01.01.05	Pelaksanaan rapat kerja daerah program pengendalian penduduk dan KB	4.921.100,00	0,00	0,00	
2.02.2.02.01.01.06	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan IMP	3.721.100,00	0,00	0,00	
2.02.2.02.01.01.07	Pemantapan advokasi kepada Lembaga Kemasyarakatan dan Klp Keg KKBPK	4.921.100,00	0,00	0,00	
2.02.2.02.01.01.10	Pelaksanaan updating keluarga melalui pendataan keluarga	11.650.000,00	0,00	11.650.000,00	0,00
2.02.2.02.01.02	Program KB	4.075.109.700,00	1.110.381.350,00	2.763.448.150,00	28,66
2.02.2.02.01.02.01	Pelayanan KB Momentum Khusus (IBI-KB-Kes Bhayangkara TNI Manunggal dan PKK) KB-Kes	42.884.400,00	10.721.100,00	32.163.300,00	25,00
2.02.2.02.01.02.02	Pengadaan sarana dan prasarana Penyuluhan dan Pelayanan Keluarga Berencana	1.642.000.000,00	639.374.500,00	1.002.625.500,00	38,94



PERUBAHAN RENCANA KERJA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi s.d Triwulan II	Sisa Anggaran s.d Triwulan II	Ket
1	2	3	4	5	6
2.08.2.02.01.02.03	Penyediaan Biaya Operasional Program KKBPK (BOKB)	2.383.492.000,00	460.285.750,00	1.725.318.250,00	21.06
2.08.2.02.01.02.07	Pembinaan Keluarga Berencana	4.541.100	0	0	
2.08.2.02.01.02.09	Pembentukan dan Pengembangan PIK Remaja/Mahasiswa	2.192.200	0	0	
2.08.2.02.01.03	Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga	17.309.400,00	11.162.200,00	6.147.200,00	64.49
2.08.2.02.01.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Poktan dan UPPKS	5.696.100,00	3.420.000,00	2.276.100,00	60.04
2.08.2.02.01.03.08	Pembinaan Klp Bina Keluarga Balita (BKB)	3.871.100,00	3.871.100,00	0,00	100,00
2.08.2.02.01.03.09	Pembinaan Klp Bina Keluarga Lansia (BKL)	3.871.100,00	3.871.100,00	0,00	0,00
2.08.2.02.01.03.10	Pembinaan Klp Bina Keluarga Remaja (BKR)	3.871.100,00	0,00	3.871.100,00	0,00
2.02.2.02.01.01	Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesenjangan Gender	84.638.200,00	9.086.600,00	18.840.000,00	32.54
2.02.2.02.01.01.01	Pembinaan Organisasi Perempuan	5.270.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.02.01.01.02	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan peran serta dan Kesenjangan Gender	28.341.600,00	0,00	0,00	
2.02.2.02.01.01.03	Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha	3.420.000,00	0,00	3.420.000,00	0,00
2.02.2.02.01.01.05	Sosialisasi Kebijakan Peningkatan Peran dan Fungsi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Publik	3.520.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.02.01.01.08	Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	3.520.000,00	3.520.000,00	0,00	100,00
2.02.2.02.01.01.09	Workshop penyusunan PPRG	7.720.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.02.01.01.11	Penyusunan Profil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	6.800.000,00	0,00	6.800.000,00	0,00
2.02.2.02.01.01.12	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	8.620.000,00	0,00	8.620.000,00	0,00
2.02.2.02.01.01.13	Penyuluhan bagi Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera	17.426.600,00	5.566.600,00	0,00	100,00
2.02.2.02.01.02	Program Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak	54.910.000,00	16.285.000,00	0,00	100,00
2.02.2.02.01.02.03	Pertemuan Forum Anak Kabupaten dan Pemilihan Dewan Anak	13.365.000,00	11.365.000,00	0,00	100,00
2.02.2.02.01.02.04	Pembentukan dan Pengembangan Kota Layak Anak	6.040.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.02.01.02.05	Sosialisasi Partisipasi Anak dalam Pembangunan	4.220.000,00	0,00	0,00	



PERUBAHAN RENCANA KERJA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020

Kode Rekening	Uraian	Anggaran	Realisasi s.d Triwulan II	Sisa Anggaran s.d Triwulan II	Ket
1	2	3	4	5	6
2.02.2.02.01.02.06	Pelatihan Pola Asuh Anak dalam Keluarga dan Penghapusan Kekerasan terhadap Anak	4.220.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.02.01.02.08	Sosialisasi Pencegahan anak dari tindak kekerasan	3.020.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.02.01.02.09	Sosialisasi Partisipasi Ibu dalam Perlindungan Anak	5.470.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.02.01.02.10	Pelatihan peningkatan SDM pelayanan dan pendampingan korban tindak kekerasan	2.895.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.02.01.02.11	Penguatan dan Pengembangan Kelembagaan P2TP2A	4.220.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.02.01.02.12	Sosialisasi sistem pencatatan dan pelaporan KDRT	2.145.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.02.01.02.13	Pembinaan Lembaga dan Penyedia Layanan bagi anak yang berkebutuhan khusus	4.395.000,00	0,00	0,00	
2.02.2.02.01.02.14	Penguatan Kota Layak Anak (KLA)	4.920.000,00	4.920.000,00	0,00	100,00

1. Pencapaian rencana kegiatan/program sampai triwulan II belum terlaksana 100% dari target kinerja yang direncanakan.
2. Faktor – faktor penyebab tidak tercapainya target kinerja program/kegiatan :
Program/kegiatan selama tahun 2020 belum terlaksana sesuai dengan target kinerja karena adanya dampak corona.
3. Implikasi yang timbul terhadap target capaian program Renstra SKPD
Target capaian program Renstra tahun 2016 – 2021 belum tentu sama target capaian program dan kegiatan rencana kerja (Renja)
4. Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk faktor – faktor penyebab tersebut adalah :
Kebijakan/tindakan perencanaan dan penganggaran untuk program/kegiatan lebih difokuskan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) dan untuk mengatasi faktor – faktor penyebab terlambatnya pelaksanaan kegiatan tahun 2020 dengan menjalin kerjasama atau koordinasi yang baik antara pimpinan, Kabid, kasi, kasubag dan Staf.

Untuk lebih jelasnya uraian mengenai evaluasi pelaksanaan Renja DP3APPKB Tahun 2020 dan Capaian Renstra Periode 2016-2021 akan disajikan pada **Tabel 2.2**



PERUBAHAN RENCANA KERJA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020

Tabel 2.2
Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD dan Pencapaian Renstra SKPD s/d Triwulan II Tahun 2020

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD (Triwulan II Tahun 2020)			Target Program/ Kegiatan Renja Perangkat daerah Tahun 2020	Prakiraan Realisasi capaian target Renstra s.d tahun berjalan 2020 (n-1)	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat daerah (Triwulan II Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100	9	10=5+7+9	11=10/4*100
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KB										
Urusan Non Wajib										
2.02.2.02.01.05.01	Program Pelayanan Perkantoran		1289	370,00	535,00	78,00	343,20	535,00	448,00	265,64
	01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran Jasa Komunikasi, sumber daya air dan listrik	60	12,00	12,00	3,00	50,00	12,00	30,00
	03	Penyediaan jasa pemeliharaan & perizinan kendaraan dinas/operasional	Jumlah STNK Kendaraan Dinas/Operasional	148	62,00	66,00	2,00	24,24	66,00	63,51
	05	Penyediaan Layanan Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah jenis peralatan kebersihan	60	12,00	10,00	-	100,00	10,00	30,00
	06	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	Jumlah jenis alat listrik/ penerangan bangunan	16	6,00	7,00	-	100,00	7,00	68,75



**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD (Triwulan II Tahun 2020)			Target Program/ Kegiatan Renja Perangkat daerah Tahun 2020	Prakiraan Realisasi capaian target Renstra s.d tahun berjalan 2020 (n-1)	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat daerah (Triwulan II Tahun 2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100	9	10=5+7+9	11=10/4*100
09	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah pengisian tabung gas	60	11,00	12,00	3,00	50,00	12,00	15,00	25,00
10	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi luar dan dalam daerah	Jumlah rapat-rapat konsultasi dan koordinasi	850	258,00	250,00	135,00	84,00	250,00	277,00	32,59
11	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Jumlah paket pelayanan administrasi perkantoran	95	9,00	10,00	3,00	50,00	10,00	15,00	15,79
18	Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/ Kantor									
34	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor				270,00	-	100,00	270,00		
36	Pemeliharaan rutin/ berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas/ operasional yang dipelihara	145	26,00	66,00	20,00	48,48	66,00	58,00	40,00
40	Pemeliharaan rutin/berkala	Jumlah jenis perlengkapan	96	24,00	25,00	25,00	100,00	25,00	32,00	33,33



**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD (Triwulan II Tahun 2020)			Target Program/ Kegiatan Renja Perangkat daerah Tahun 2020	Prakiraan Realisasi capaian target Renstra s.d tahun berjalan 2020 (n-1)	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat daerah (Triwulan II Tahun 2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100	9	10=5+7+9	11=10/4*100
	peralatan gedung kantor	gedung yang dipelihara								
	46 Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor				1,00	1,00	100,00	1,00		
	63 Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah PNS yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	31	12,00	5,00	4,00	100,00	5,00	14,00	45,16
2.02.2.02.01.06	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja, dan Keuangan Perangkat Daerah		60	10,00	10,00	-	-	10,00	10,00	31,11
	10 Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah laporan yang disusun	45	8,00	6,00	1,00	33,33	6,00	8,00	17,78
	11 Penyusunan dokumen pelaporan kinerja		15	2,00	6,00	1,00	83,33	6,00	2,00	13,33
	12 Penyusunan dokumen pelaporan keuangan				6,00	1,00	83,33	6,00		



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020

KODE	Urusan/Bidang Ururan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD (Triwulan II Tahun 2020)			Target Program/ Kegiatan Renja Perangkat daerah Tahun 2020	Prakiraan Realisasi capaian target Renstra s.d tahun berjalan 2020 (n-1)	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat daerah (Triwulan II Tahun 2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100	9	10=5+7+9	11=10/4*100
	13	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi			4,00	1,00	50,00	4,00		
Urusan Wajib										
2.02.2.02.01.01	Program Pemberdayaan Perempuan dan Kestaraan Gender		3444	215	265	263	94.74	-	528	36.62
	01	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah organisasi perempuan yang dibina							
	02	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender								
	03	Bimbingan Manajemen Usaha bagi Perempuan dalam Mengelola Usaha	Jumlah peserta bimbingan	250	-	50,00	-	100,00	50,00	20.00
	05	Sosialisasi Kebijakan Pangkatan Peran dan Fungsi Perempuan di Bidang Politik dan	Jumlah peserta sosialisasi pencatatan dan pelaporan KDRT	650	50				100	15.38



**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD (Triwulan II Tahun 2020)			Target Program/ Kegiatan Renja Perangkat daerah Tahun 2020	Prakiraan Realisasi capaian target Renstra s.d tahun berjalan 2020 (n-1)	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat daerah (Triwulan II Tahun 2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100	9	10=5+7+9	11=10/4*100
	Jabatan Publik									
08	Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Jumlah peserta rapat sosialisasi	250	-	50,00	50,00	100,00	50,00	100	40.00
09	Workshop penyusunan PPRG									
11	Penyusunan profil pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Profil pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	8	2	2,00	-	100	2,00	4	50.00
12	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak				34,00	-	0,00	34,00		
13	Penyuluhan ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera				100,00	30,00	75,00	100,00		
2.02.2.02.01.02	Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak		3444	466	887	348	29.65		814	21.17
03	Pertemuan Forum Anak Kabupaten dan Pemilihan	Jumlah Sekolah Ramah Anak	860	165	165,00	-	100,00	165,00	330	38.37



**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD (Triwulan II Tahun 2020)			Target Program/ Kegiatan Renja Perangkat daerah Tahun 2020	Prakiraan Realisasi capaian target Renstra s.d tahun berjalan 2020 (n-1)	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat daerah (Triwulan II Tahun 2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100	9	10=5+7+9	11=10/4*100
	Dewan Anak									
04	Pembentukan dan Pengembangan Kabupaten Layak Anak	Jumlah Sekolah Ramah Anak								
05	Sosialisasi Partisipasi anak dalam Pembangunan	Jumlah Peserta Sosialisasi								
06	Pelatihan Pola Asuh Anak dalam Keluarga dan Penghapusan Kekerasan terhadap Anak	Jumlah peserta sosialisasi								
08	Sosialisasi pencegahan anak dari tindak kekerasan									
09	Sosialisasi Partisipasi Ibu dan Perlindungan Anak									
10	Pelatihan peningkatan SDM pelayanan dan pendampingan korban tindak kekerasan									



**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD (Triwulan II Tahun 2020)			Target Program/ Kegiatan Renja Perangkat daerah Tahun 2020	Prakiraan Realisasi capaian target Renstra s.d tahun berjalan 2020 (n-1)	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat daerah (Triwulan II Tahun 2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100	9	10=5+7+9	11=10/4*100
	11	Penguatan dan pengembangan kelembagaan P2TP2A								
	12	Sosialisasi system pencatatan dan pelaporan KDRT								
	13	Pembinaan lembaga dan penyedia layanan bagi anak yang berkebutuhan khusus								
	14	Penguatan Kota Layak Anak (KLA)			10,00	10,00	100,00	10,00		
2.08.2.08.01.01	Program Pengendalian Penduduk		625	24,00	49,00	1,00	100,00	49,00	25,00	40,00
	02	Sosialisasi Kajian Kebijakan pengendalian penduduk bagi pengelola Program KB dan Organisasi Kemasyarakatan	Jumlah Peserta	500	-				-	-
	04	Pengolahan data dan informasi program KB	Jumlah Laporan	120	24,00	24,00	2,00	16,67	24,00	20,00



**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD (Triwulan II Tahun 2020)			Target Program/ Kegiatan Renja Perangkat daerah Tahun 2020	Prakiraan Realisasi capaian target Renstra s.d tahun berjalan 2020 (n-1)	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat daerah (Triwulan II Tahun 2020	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100	9	10=5+7+9	11=10/4*100
	05	Pelaksanaan rapat kerja daerah program pengendalian penduduk dan KB								
	06	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan IMP								
	07	Pemantapan advokasi kepada lembaga kemasyarakatan dan klp keg KKBP								
	10	Pelaksanaan updating keluarga melalui pendataan keluarga			70,00	-	0,00	70,00		
2.08.2.08.01.01	Program KB		36026	8.079,00	7.226,00	3.213,00	207,50	7.226,00	11.392,00	408,25
	01	Pelayanan KB Momentum Khusus (IBI-KB- Kes,Bhayangkara, TNI Manunggal, dan PKK) KB-Kes	Jumlah peserta KB yang dilayani	34.500	7.689,00	7.000,00	1,000	25,00	7.000,00	10.794,00
	02	Pengadaan Sarana dan Prasarana Penyuluhan dan Pelayanan KB	Jumlah sarana dan prasarana KB	15	6,00	15,00	8,00	53,33	15,00	13,00
										86,67



**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020**

KODE	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja Capaian Renstra SKPD Tahun 2021 (akhir periode Renstra SKPD)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2019	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Keluaran Kegiatan SKPD (Triwulan II Tahun 2020)			Target Program/ Kegiatan Renja Perangkat daerah Tahun 2020	Prakiraan Realisasi capaian target Renstra s.d tahun berjalan 2020 (n-1)	
					Target Renja Perangkat daerah Tahun 2020	Realisasi Renja Perangkat daerah (Triwulan II Tahun 2020)	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun 2020	Tingkat Capaian Realisasi Target (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6x100	9	10=5+7+9	11=10/4*100
	03	Penyediaan Biaya Operasional Program KKBPK (BOKB)	8	8,00	8,00	1,00	25,00	8,00	9,00	112,50
	07	Pembinaan Keluarga Berencana	Jumlah Kegiatan Pembinaan KB	23	1,00	1,00	-	0,00	1,00	4,35
	09	Pembentukan dan Pengembangan PIK Remaja/Mahasiswa	Jumlah kelompok yang dibentuk	280	75,00				75,00	26,79
2.08.2.02.01.03	Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga		1920	250,00	520,00	210,00	200,00	520,00	460,00	140,95
	03	Pembinaan dan pengembangan poktan dan UPPKS	70	-	13,00	-	0,00	13,00	70,00	100,00
	08	Pembinaan Klp Bina Keluarga Balita (BKB)	50	-	70,00	-	100,00	70,00	-	-
	09	Pembinaan Klp Bina Keluarga Lansia (BKL)			70,00	-	100,00	70,00		
	10	Pembinaan Klp Bina Keluarga Remaja (BKR)	750	100,00	70,00	-	0,00	70,00	100,00	13,33



PERUBAHAN RENCANA KERJA

**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020**

Dari Tabel diatas dapat dilihat bahwa dari Ke-Sembilan Program yang dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020, terdapat 7 Program yang capaian Kinerja dan Realisasi Keuangannya Sangat Rendah, yaitu Program Pelayanan Perkantoran, Program Peningkatan Profesionalisme Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Laporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Pengendalian Penduduk, Program KB , Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga dan Program Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak.

Sedangkan Program yang capaian Kinerja dan Keuangannya termasuk Kriteria Rendah yaitu Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur. Hal-hal tersebut dikarenakan belum maksimalnya pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun Anggaran 2020, dan juga disebabkan oleh terbatasnya SDM yang dimiliki khususnya dalam pengolahan administrasi kegiatan.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan SKPD

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana berdasarkan indikator Kinerja yang sesuai tugas dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang telah tertuang dalam RPJMD Kabupaten Soppeng Tahun 2016-2021 dan Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2016-2021 dapat dilihat pada Tabel 2.3 dibawah ini :



Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA SKPD						REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Laju pertumbuhan penduduk (LPP)	0,08	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,07	0,13	0,07	0,07	
2	Total Fertility Rate (TFR)	2,3	2,3	2,15	2,1	2,05	2	2,15	2,1	2,05	2	
3	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang berperan aktif dalam pembangunan Daerah melalui Kampung KB	19,44%	36,84%	37,00%	38,00%	39,00%	40,00%	37,00%	38,00%	39,00%	40,00%	
4	Persentase Perangkat Daerah (Dinas/Badan) yang menyusun dan memanfaatkan Rancangan Induk Pengendalian Penduduk	0,00%	0,00%	10,53%	12,00%	13,00%	14,00%	10,53%	12,00%	13,00%	14,00%	
5	Jumlah kebijakan (Peraturan Daerah/Peraturan Kepala Daerah) yang mengatur tentang pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk	0	0	1	2	3	4	1	2	3	4	
6	Jumlah sektor yang menyepakati dan memanfaatkan data profil (parameter dan proyeksi penduduk) untuk perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan	0	0	1	2	3	4	1	2	3	4	
7	Jumlah kerjasama penyelenggaraan pendidikan formal, non formal, dan informal yang melakukan pendidikan kependudukan	0	0	1	2	3	4	1	2	3	4	
8	Rata-rata jumlah anak per keluarga	0	121,12	2,92	2,91	2,9	2,8	2,92	2,91	2,9	2,8	
9	Ratio Akseptor KB	77,94%	75,01%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	77,00%	75,00%	75,00%	
10	Angka pemakaian kontrasepsi/CPR bagi perempuan menikah usia 15 – 49	77,94%	75,01%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	75,00%	
11	Angka kelahiran remaja (perempuan usia 15–19) per 1.000 perempuan usia 15–19 tahun (ASFR 15–19)	0,78%	0,65%	0,55%	0,50%	0,45%	0,40%	0,55%	2,19%	0,45%	0,40%	
12	Cakupan Pasangan Usia Subur (PUS) yang istrinya dibawah 20 tahun	3,03%	7,99%	2,52%	2,50%	2,50%	2,50%	2,52%	2,50%	2,50%	2,50%	
13	Cakupan PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (unmet need)	13,74%	15,67%	13,74%	13,74%	13,74%	13,74%	13,74%	14,16%	13,74%	13,74%	



**Minas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020**

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA SKPD						REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
14	Persentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)	18,87%	14,17%	18,87%	18,87%	18,87%	18,87%	18,87%	18,87%	18,87%	18,87%	
15	Persentase tingkat keberlangsungan pemakaian kontrasepsi	28,30%	33,32%	35,00%	40,00%	45,00%	50,00%	35,00%	40,00%	45,00%	50,00%	
16	Cakupan anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB	54,04%	53,43%	54,04%	55,00%	56,00%	57,00%	54,04%	65,7%	56,00%	57,00%	
17	Cakupan anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) ber-KB	56,43%	56,08%	56,00%	56,00%	56,00%	56,00%	56,00%	63,00%	56,00%	56,00%	
18	Cakupan anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) ber-KB	54,00%	53,00%	53,00%	53,00%	53,00%	53,00%	53,00%	45,02%	53,00%	53,00%	
19	Pusat Pelayanan Keluarga Sejahtera (PPKS) di setiap Kecamatan	12,50%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
20	Cakupan Remaja dalam Pusat Informasi Dan Konseling Remaja/Mahasiswa	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
21	Cakupan PKB/PLKB yang didayagunakan Perangkat Daerah KB untuk perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah di bidang pengendalian penduduk	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
22	Cakupan PUS peserta KB anggota Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) yang ber-KB mandiri	83,37%	83,51%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
23	Rasio petugas Pembantu Pembina KB Desa (PPKBD) setiap desa/kelurahan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
24	Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat	25,65%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
25	Persentase Faskes dan jejaringnya (diseluruh tingkatan wilayah) yang bekerjasama dengan BPJS dan memberikan pelayanan KBKR sesuai dengan standarisasi pelayanan	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	
26	Cakupan penyediaan Informasi Data Mikro Keluarga di setiap desa	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	



**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020**

NO	INDIKATOR	TARGET RENSTRA SKPD						REALISASI CAPAIAN		PROYEKSI		CATATAN ANALISIS
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
27	Persentase remaja yang terkena Infeksi Menular Seksual (IMS)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	
28	Cakupan kelompok kegiatan yang melakukan pembinaan keluarga melalui 8 fungsi keluarga	67,43%	70,95%	72,00%	73,00%	74,00%	75,00%	72,00%	73,00%	74,00%	75,00%	
29	Cakupan keluarga yang mempunyai balita dan anak yang memahami dan melaksanakan pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak	10,11%	9,81%	10,00%	11,00%	12,00%	13,00%	10,00%	11,00%	12,00%	13,00%	
30	Rata-rata usia kawin pertama wanita	0,00%	0,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	25,00%	
31	Persentase Pembiayaan Program Kependudukan, Keluarga Bencana dan Pembangunan Keluarga melalui APBD dan APBDes (APBD)	0,45%	0,55%	2,00%	3,00%	4,00%	5,00%	2,00%	2,00%	4,00%	5,00%	
32	Persentase partisipasi perempuan di Lembaga Pemerintah	10.94%	10.94%	11.61%	11.75%	12%	12.50%	11.20%	12,95%	12%	12.50%	
33	Partisipasi perempuan di DPR	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	20.00	60,31%	20.00	20.00	
34	Partisipasi perempuan di lembaga swasta	89.06	88.61	90.50	91.00	92.00	93.00	89.50	87,06%	92.00	93.00	
35	Persentase organisasi sosial kemasyarakatan perempuan	32	40.50	41	42	43	44	27.00	28,11	43	44	
36	Persentase SKPD yang menerapkan PPRG	0.00	31.50	100	100	100	100	100.00	100	100	100	
37	Cakupan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan-bantuan hukum	23	40.50	41	42	43	44	41	100	43	44	
38	Persentase lembaga perlindungan anak	4	6	7	8	9	9	7	8	9	9	
39	Persentase penyelesaian pengaduan kekerasan terhadap anak	100	100	100	100	100	100	98,00	100	100	100	
40	Jumlah kecamatan ramah anak	1	2	4	6	7	8	4	8	7	8	
41	Persentase penyelesaian pengaduan kekerasan terhadap perempuan	100	100	100	100	100	100	90.00	90.00	100	100	
42	Persentase aparatur yang berkinerja sangat baik	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	



PERUBAHAN RENCANA KERJA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020

2.3 ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI DP3APPKB

Untuk mencapai tujuan tersebut dilaksanakan melalui tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana sebagai berikut:

a. Tugas Pokok :

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Soppeng Nomor 39 Tahun 2019 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Soppeng bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Perempuan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mempunyai **tugas** membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

b. Fungsi :

Sedangkan **Fungsinya** adalah :

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang pelaksanaan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas urusan pemerintahan bidang Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng

Dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, muncul beberapa permasalahan yang salah satu penyebabnya adalah masih kurang tanggapnya dalam memanfaatkan peluang yang tersedia. Oleh karena itu diperlukan adanya identifikasi dan perumusan terhadap masalah yang dihadapi. Identifikasi dan perumusan permasalahan serta isu strategis diperlukan untuk mengetahui berbagai faktor yang dapat menjadi penghambat dan berpengaruh terhadap kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng.

Identifikasi masalah diuraikan berdasarkan beberapa unsur yang dianggap memiliki pengaruh yang saling berhubungan. Permasalahan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut :



PERUBAHAN RENCANA KERJA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020

1. Kurangnya Aparatur Sipil Negara yang ada pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
2. Terbatasnya jumlah tenaga penyuluh KB
3. Angka Unmet Need yang belum mencapai Target yang direncanakan
4. Rendahnya kepesertaan laki-laki dalam ber-KB
5. Belum Maksimalnya Sosialisasi Komunikasi, Informasi Edukasi (KIE).
6. Upaya penurunan jumlah keluarga prasejahtera belum terintegrasi secara teknis dalam kerangka penurunan jumlah penduduk miskin ditingkat provinsi maupun kabupaten/kota
7. Program ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga (Bina Keluarga Balita, Bina Keluarga Remaja, Bina Keluarga Lansia, Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS), PIK Remaja/Mahasiswa belum dilaksanakan secara komprehensif lintas sektor.
8. Belum adanya regulasi/kebijakan yang menangani tentang Pengendalian Kualitas dan Kuantitas penduduk
9. Belum tersusunnya rancangan Induk Pengendalian Penduduk yang melibatkan lintas sektor terkait yang dapat dimanfaatkan oleh semua Perangkat Daerah yang ada di Kabupaten Soppeng
10. Pendataan Keluarga yang belum optimal dilihat dari banyaknya data-data yang diperlukan belum terakomodir.
11. Belum semua SKPD memiliki pemahaman dan komitmen yang sama untuk pelaksanaan Pengarusutamaan Gender.
12. Rendahnya keterampilan teknis PPRG aparat perencana SKPD.
13. Terbatasnya SDM yang memiliki kompetensi dalam memfasilitasi dan advokasi pentingnya implementasi PUG melalui PPRG di SKPD kabupaten.
14. Belum tersedianya data pilah sebagai prasyarat utama implementasi PPRG.
15. Belum tersedianya system dan mekanisme data untuk menghimpun data korban kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Soppeng.
16. Upaya perlindungan terhadap perempuan dan anak belum dimaknai secara utuh dalam kerangka keterpaduan dan lintas sektor/SKPD/Lembaga terkait dalam kesatuan system.
17. Upaya pencegahan dan deteksi dini dalam mengurangi kasus kekerasan terhadap anak masih relating kurang dibandingkan aspek penanganan kasus.
18. Fungsi layanan terpadu sesuai SPM bidang layanan terpadu penanganan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak belum maksimal.
19. Upaya pemberdayaan perempuan, utamanya bagi kelompok rentan (penyandang disabilitas, lansia, perempuan kepala rumah tangga) belum maksimal dilaksanakan secara terpadu lintas sektor.

Jika permasalahan ini tidak segera diselesaikan maka akan berdampak pada Laju Pertumbuhan Penduduk dan Peningkatan Kualitas Keluarga. Adapun Solusi dalam mengatasi permasalahan diatas adalah sebagai berikut:

1. Menambah kuantitas Aparatur Sipil Negara dan Tenaga Penyuluh KB serta meningkatkan kualitasnya melalui pendidikan, pelatihan atau Bimbingan teknis sesuai peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
2. Sinergitas program DP3APPKB khususnya Urusan Kesenjangan Gender, Perlindungan anak, Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dengan Visi kabupaten Soppeng periode 2016-2021



PERUBAHAN RENCANA KERJA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020

3. Adanya kerjasama (MOU) dengan Organisasi Kemasyarakatan dalam pelaksanaan Program KKBPK
4. Masih adanya hubungan koordinasi dengan BKKBN berupa program dan pendanaan
5. Peningkatan Pelayanan KB yang berkualitas di Faskes KB maupun Klinik KB melalui pelatihan bagi Tenaga-tenaga Medis dan peningkatan sarana prasarana pelayanan KB.
6. Pembuatan Grand Design Kependudukan
7. Meningkatkan efektifitas/kelangsungan ber-KB dari metode Jangka Pendek (Pil, Suntik, dan Kondom) menjadi Metode jangka Panjang (MOW, MOP, IUD, dan Implant).
8. Meningkatkan akses pelayanan KB – KR pada daerah pelosok.
9. Menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi bagi keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I.
10. Meningkatkan kemitraan dalam rangka revitalisasi program KB-KR dengan mitra kerja (TNI, POLRI, IBI, IDI, Perguruan Tinggi, KNPI, NU, Pramuka, dll)
11. Meningkatkan kegiatan advokasi dan KIE serta mengembangkan materi KIE KB.
12. Meningkatnya organisasi perempuan yang aktif melaksanakan kegiatan di dunia usaha dan jabatan-jabatan public.
13. Meningkatnya peran serta perempuan dalam dunia usaha, di bidang politik dan pemerintahan.
14. Tersedianya data terpilah di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
15. Meningkatkan ketahanan dan kualitas keluarga pra sejahtera.
16. Terbentuknya Perda tentang kota layak anak yang membantu dalam pengembangan Kabupaten Soppeng menjadi Kota Layak Anak.
17. Terbentuknya forum anak kabupaten Soppeng dan pemilihan dewan anak.
18. Anak mulai berpartisipasi dalam pembangunan dengan keikutsertaan anak dalam forum musrembang baik di kecamatan maupun di tingkat kabupaten.
19. Meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap adanya tindak kekerasan terhadap anak dan perempuan
20. Semakin bertambahnya sekolah ramah anak di kabuapten soppeng.

DAMPAK TERHADAP VISI MISI KEPALA DAERAH

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng mempunyai peran dan posisi penting, baik dalam upaya menyukseskan Visi dan Misi Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng maupun pencapaian tugas pokok dan fungsi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng.

Berlandaskan hasil rumusan Visi dan Misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Soppeng yang telah disusun berdasarkan target capaian setiap tahunnya, maka perlu adanya sinergitas dengan Renja SKPD.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Soppeng berkepentingan untuk memberikan kontribusi terhadap upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan



PERUBAHAN RENCANA KERJA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020

Pengarustamaangender, Perlindungan terhadap anak dan perempuan, pengendalian penduduk, keluarga berencana dan Keluarga Sejahtera.

Pemerintah Kabupaten Soppeng harus menetapkan kebijakan dalam hal pengendalian penduduk dan menciptakan keluarga kecil yang berkualitas, Persamaan gender dan pemenuhan hak anak.

Secara konseptual Visi dan Misi pemberdayaan perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senantiasa bermuara kepada tercapainya implementasi pengarustamaangender, Pemenuhan Hak Anak, Keluarga kecil berkualitas dan penduduk tubuh seimbang sejalan dengan Visi Pemerintah Daerah Kabupaten Soppeng sebagai Pemerintahan yang melayani dan lebih baik

DAMPAK TERHADAP CAPAIAN PROGRAM NASIONAL

Keberhasilan pembangunan kependudukan dalam rangka menurunkan angka fertilitas dan peningkatan usia harapan hidup di Indonesia selama ini telah menghasilkan **transisi demografi**. Transisi demografi tersebut ditandai dengan menurunnya angka kelahiran dan kematian, dan disertai peningkatan angka harapan hidup.

Hal tersebut telah mengubah struktur umur penduduk, yakni menurunnya proporsi penduduk usia di bawah 15 tahun yang diikuti dengan meningkatnya proporsi penduduk usia produktif (15-64 tahun) dan meningkatnya proporsi penduduk usia tua (65 tahun ke atas) secara perlahan.

Selanjutnya kondisi tersebut menyebabkan angka ketergantungan menurun yang disebut dengan **bonus demografi**. Bonus demografi ini merupakan **jendela peluang** (*Window of Opportunity*) yang menjadi landasan untuk memicu pertumbuhan ekonomi. Bonus demografi atau jendela peluang tersebut diperkirakan akan terjadi hanya sekali saja dalam sejarah dan waktunya sangat pendek, yaitu sekitar 5 tahun dari tahun 2020-2025 (Proyeksi Penduduk berdasarkan SUPAS 2005), dengan syarat angka kelahiran dapat dikendalikan. Oleh sebab itu melalui Pembangunan Kependudukan dan KB (Pembangunan KKB), Indonesia khususnya di Kabupaten Soppeng harus benar-benar dapat memanfaatkan-nya. Peluang emas tersebut dapat dimanfaatkan untuk memicu pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan rakyat

Perencanaan pembangunan dibidang Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam rangka pelaksanaan implementasi pengarustamaangender yaitu mendorong peningkatan kehidupan beragama serta partisipasi pemuda dan perempuan dalam pembangunan serta pemenuhan hak-hak anak

TANTANGAN DAN PELUANG

Uraian tentang gambaran kondisi saat ini terkait pembangunan Keluarga, Keluarga Sejahtera, Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk dan pembangunan keluarga berencana serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Soppeng diatas mengantar kita pada analisis tantangan dan peluang dalam menjalankan fungsi pelayanan Pengendalian Penduduk, Pembangunan Keluarga Berencana, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kabupaten Soppeng. Tantangan merupakan kesenjangan atas kondisi saat ini terhadap kondisi ideal yang kita harapkan. Beberapa hal yang menjadi tantangan Dinas Pemberdayaan



PERUBAHAN RENCANA KERJA

**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020**

perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng untuk diwujudkan dalam kurun waktu renstra ini meliputi hal-hal berikut:

TANTANGAN

Dalam pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, terdapat beberapa tantangan yang dihadapi, diantaranya sebagai berikut:

1. Target Total Fertility Rate dan LPP yang perlu dipertahankan disesuaikan dengan pencapaian target yang ada;
2. Meningkatkan target pelayanan akseptor KB bagi pasangan usia subur, khususnya Akseptor KB MKJP;
3. Cakupan pasangan usia subur (PUS) yang isterinya dibawah usia 20 tahun yang Datanya tidak tersedia pada format pendataan Tahun 2015;
4. Capaian Target Cakupan pasangan usia subur yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need);
5. Target cakupan PUS peserta KB anggota Bina Keluarga Balita (BKB) ber-KB yang sudah cukup tinggi dan perlu dipertahankan lagi;
6. Tuntutan penerapan PPRG diseluruh SKPD propinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran program dan kegiatan
7. Tuntutan penerapan SPM layanan terpadu bidang perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan dipropinsi dan seluruh kabupaten/kota
8. Target Cakupan PUS peserta KB anggota usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera yang ber-KB yang sudah cukup tinggi dan perlu dipertahankan lagi;
9. Jumlah petugas lapangan KB (PLKB/PKB) yang semakin berkurang di Lini Lapangan sementara tidak ada lagi pengangkatan PLKB yang baru
10. Target penurunan jumlah keluarga prasejahtera setiap tahun
11. Tuntutan pemenuhan layanan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan
12. Capaian peningkatan persentase perempuan dalam pengambilan keputusan di lembaga pemerintahan
13. Peluang perempuan di lembaga pemerintahan semakin terbuka lebar
14. Target kuota perempuan di parlemen terpenuhi
15. Tersedianya data terpilah

PELUANG

Dalam pelaksanaan urusan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, beberapa peluang dapat dimanfaatkan untuk menjawab beberapa tantangan tersebut diatas meliputi:

1. Komitmen pemerintah pusat dalam pelaksanaan program KKBPK yang termuat dalam Agenda Prioritas (Nawa Cita) Pemerintah 2015-2019, yaitu agenda prioritas kelima yaitu meningkatkan kualitas hidup, manusia Indonesia di poin pertama yaitu Pembangunan Kependudukan dan Keluarga Berencana;
2. Regulasi teknis di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota dalam hal Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera;
3. Tingkat Animo masyarakat untuk menggunakan Alat Obat Kontrasepsi MKJP yang semakin meningkat, terutama Vasektomi pada Pria;



PERUBAHAN RENCANA KERJA

**Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020**

4. Semakin banyaknya kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan dalam menggerakkan Kampung KB yang menandakan pelaksanaan Program KKBPK di Lini Lapangan terlaksana dengan baik;
5. Peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga menjadi perhatian beberapa Perangkat Daerah;
6. Pemenuhan kelengkapan sarana dan prasarana fasilitas faskes KB melalui Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik Sub Bidang Keluarga Berencana.
7. Meningkatnya pemahaman eksekutif maupun legislatif tentang PUG dan PP sebagai suatu strategis pembangunan
8. Peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga menjadi perhatian SKPD
9. Perkembangan lingkungan strategis global yang menuntut jaminan pemenuhan atas hak azasi manusia termasuk didalamnya hak perlindungan dan non diskriminasi.

Rekomendasi dan Catatan yang Strategis Untuk Ditindak Lanjuti Dalam Perumusan Program dan Kegiatan Prioritas Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020 yaitu diharapkan adanya dukungan Pemerintah Daerah dalam menyukseskan Pelaksanaan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga dan Program Pengarusutamaan gender di Kabupaten Soppeng, khususnya dalam memaksimalkan Pagu Anggaran untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2019.

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Dalam setiap penyusunan Rencana Kerja, DP3APPKB Kabupaten Soppeng selalu melakukan analisis kebutuhan. Analisis ini dilakukan untuk mengakomodir semua kebutuhan untuk pelaksanaan kegiatan. Kebutuhan ini disesuaikan dengan target yang akan dicapai/direncanakan sesuai dengan Renstra DP3APPKB yang telah disusun.

Program dan Kegiatan yang ada di DP3APPKB Kabupaten Soppeng sudah sesuai dengan RKPD Kabupaten Soppeng. Program dan kegiatan ini diharapkan mampu mendukung tercapainya visi misi Pemerintah Kabupaten Soppeng.

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Soppeng Tahun 2020 merupakan langkah awal bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) pada tahun 2020 dengan memperhatikan kebutuhan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi. RKPD juga merupakan landasan kegiatan perencanaan pembangunan tahunan yaitu tahun 2020 yang berisi program dan kegiatan sebagai pedoman perencanaan pembangunan. Program dan kegiatan yang tercantum dalam RKPD dibandingkan dengan analisis kebutuhan berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah sehingga menghasilkan program prioritas dalam pembangunan Kabupaten Soppeng.

Pada Rencana Kerja tahun 2020 akan disinkronisasi dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Soppeng sehingga menjadi rumusan program dan kegiatan yang definitive untuk dijadikan rencana kerja tahun 2020.

Dibawah ini adalah tabel review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2020, dimana pada tabel tersebut dapat dilihat kesesuaian antara Rancangan Awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.



Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020

Tabel 2.4
Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2020

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROG/KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROG/ KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
A	Program Pemberdayaan Perempuan dan Kestaraan Gender		Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	98.12%	23.781.600.00	Program Pemberdayaan Perempuan dan Kestaraan Gender		Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	98.12%	23.781.600.00	
1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	20 organisasi	-	Pembinaan Organisasi Perempuan	Kabupaten, Kecamatan Lalabata	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	20 organisasi	-	
2	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	Kec.Lalabata	Jumlah peserta pelatihan	20 orang	-	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	Kec.Lalabata	Jumlah peserta pelatihan	20 orang	-	
3	Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Kec.Lalabata	Jumlah kelompok usaha yang mendapatkan bimbingan	50 orang	3.420.000.00	Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Kec.Lalabata	Jumlah kelompok usaha yang mendapatkan bimbingan	50 orang	3.420.000.00	
4	Sosialisasi Kebijakan Peningkatan Peran dan Fungsi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Publik	Kec.Donri-Donri	Jumlah peserta sosialisasi	50 orang	-	Sosialisasi Kebijakan Peningkatan Peran dan Fungsi Perempuan di Bidang Politik dan Jabatan Publik	Kec.Donri-Donri	Jumlah peserta sosialisasi	50 orang	-	
5	Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	Kec.Lalabata	Jumlah peserta workshop	50 peserta	3.520.000.00	Workshop Peningkatan Peran Perempuan dalam Pengambilan Keputusan	Kec.Lalabata	Jumlah peserta workshop	50 peserta	3.520.000.00	
6	Workshop Penyusunan PPRG	Kec.Lalabata	Jumlah peserta workshop	75 peserta	-	Workshop Penyusunan PPRG	Kec.Lalabata	Jumlah peserta workshop	75 peserta	-	
7	Penyusunan Profil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kec.Lalabata	Jumlah Profil	2 dokumen	6.800.000.00	Penyusunan Profil Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Kec.Lalabata	Jumlah Profil	2 dokumen	6.800.000.00	
8	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kec.Lalabata	Jumlah lokus yang dibina	34 lokus	4.475.000.00	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Kec.Lalabata	Jumlah lokus yang dibina	34 lokus	4.475.000.00	
9	Penyuluhan Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera	Kecamatan Liliraja	Jumlah keluarga yang di bina	100 Keluarga	5.566.600.00	Penyuluhan Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera	Kecamatan Liliraja	Jumlah keluarga yang di bina	100 Keluarga	5.566.600.00	
B	Program Peningkatan Kualitas Keluarga dan		Ratio KDRT	0.00%	16.285.000.00	Program Peningkatan Kualitas Keluarga dan		Ratio KDRT	0.00%	16.285.000.00	



**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020**

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROG/KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROG/ KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Sosialisasi kajian kebijakan pengendalian penduduk bagi Pengelola Program KB dan Organisasi Kemasyarakatan	Watansoppeng	Peserta Sosialisasi	100 Orang	-	Sosialisasi kajian kebijakan pengendalian penduduk bagi Pengelola Program KB dan Organisasi Kemasyarakatan	Watansoppeng	Peserta Sosialisasi	100 Orang	-	
2	Pengolahan data dan informasi program KB	Watansoppeng	Jumlah Laporan	24 Laporan	10.440.000,00	Pengolahan data dan informasi program KB	Watansoppeng	Jumlah Laporan	24 Laporan	10.440.000,00	
3	Pelaksanaan rapat kerja daerah program pengendalian penduduk dan KB	Watansoppeng	Jumlah peserta Rakerda	200 Orang	-	Pelaksanaan rapat kerja daerah program pengendalian penduduk dan KB	Watansoppeng	Jumlah peserta Rakerda	200 Orang	-	
4	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan IMP	Watansoppeng	Jumlah PPKBD dan sub PPKBD yang dibina	100 Orang	-	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan IMP	Watansoppeng	Jumlah PPKBD dan sub PPKBD yang dibina	100 Orang	-	
5	Pemantapan advokasi kepada Lembaga Kemasyarakatan dan Klp Keg KKBPK	Watansoppeng	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diadvokasi	10 Lembaga	-	Pemantapan advokasi kepada Lembaga Kemasyarakatan dan Klp Keg KKBPK	Watansoppeng	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang diadvokasi	10 Lembaga	-	
6	Pelaksanaan Updating Keluarga melalui pendataan Keluarga	Watansoppeng	Jumlah desa/kelurahan wilayah pendataan	70 desa/kelurahan	11.650.000,00	Pelaksanaan Updating Keluarga melalui pendataan Keluarga	Watansoppeng	Jumlah desa/kelurahan wilayah pendataan	70 desa/kelurahan	11.650.000,00	
D	Program KB		Ratio Akseptor KB Aktif & Cakupan PUS yang ber KB	76.50%	3.864.904.500,00	Program KB		Ratio Akseptor KB Aktif & Cakupan PUS yang ber KB	76.50%	3.864.904.500,00	
1	Pelayanan KB Momentum Khusus (IBI KB Kes, Bhayangkara, TNI Manunggal, dan PKK) KB Kes	Watansoppeng	Jumlah peserta KB yang di layani	7.000 Akseptor KB	35.534.400,00	Pelayanan KB Momentum Khusus (IBI KB Kes, Bhayangkara, TNI Manunggal, dan PKK) KB Kes	Watansoppeng	Jumlah peserta KB yang di layani	7.000 Akseptor KB	35.534.400,00	
2	Pengadaan sarana dan prasarana Penyuluhan dan Pelayanan Keluarga Berencana	Watansoppeng	Jumlah sarana dan prasana KB	15 Paket	1.642.000.000,00	Pengadaan sarana dan prasarana Penyuluhan dan Pelayanan Keluarga Berencana	Watansoppeng	Jumlah sarana dan prasana KB	15 Paket	1.642.000.000,00	
3	Penyediaan Biaya Operasional Program KKBPK (BOKB)	Watansoppeng	Jumlah Balai PLKB yang dibiayai	8 Balai PLKB	2.185.604.000,00	Penyediaan Biaya Operasional Program KKBPK (BOKB)	Watansoppeng	Jumlah Balai PLKB yang dibiayai	8 Balai PLKB	2.185.604.000,00	
4	Pembinaan Keluarga Berencana	Watansoppeng	Jumlah kegiatan pembinaan KB	1 Kegiatan	1.766.100,00	Pembinaan Keluarga Berencana	Watansoppeng	Jumlah kegiatan pembinaan KB	1 Kegiatan	1.766.100,00	



**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020**

NO	RANCANGAN AWAL RKPd					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROG/KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROG/ KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Pembentukan dan Pengembangan PIK Remaja/Mahasiswa	Watansoppeng	Jumlah PIK yang dibina	2 Kelompok	-	Pembentukan dan Pengembangan PIK Remaja/Mahasiswa	Watansoppeng	Jumlah PIK yang dibina	2 Kelompok	-	
E	Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga		Persentase Anggota Kelompok UPPKS yang ber-KB	25%	12.684.400,00	Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga		Persentase Anggota Kelompok UPPKS yang ber-KB	25%	12.684.400,00	
1	Pembinaan dan Pengembangan Poktan dan UPPKS	Watansoppeng	Jumlah Kelompok yang dibina	13 Kelompok	2.471.100,00	Pembinaan dan Pengembangan Poktan dan UPPKS	Watansoppeng	Jumlah Kelompok yang dibina	13 Kelompok	2.471.100,00	
2	Pembinaan Klp Bina Keluarga Balita (BKB)	Watansoppeng	Jumlah anggota kelompok yang mengikuti pelatihan	70 Orang	3.871.100,00	Pembinaan Klp Bina Keluarga Balita (BKB)	Watansoppeng	Jumlah anggota kelompok yang mengikuti pelatihan	70 Orang	3.871.100,00	
3	Pembinaan Klp Bina Keluarga Remaja (BKR)	Watansoppeng	Jumlah anggota kelompok yang mengikuti pelatihan	30 Orang	2.471.100,00	Pembinaan Klp Bina Keluarga Remaja (BKR)	Watansoppeng	Jumlah anggota kelompok yang mengikuti pelatihan	30 Orang	2.471.100,00	
4	Pembinaan Klp Bina Keluarga Lansia (BKL)	Watansoppeng	Jumlah anggota kelompok yang mengikuti pelatihan	70 Orang	3.871.100,00	Pembinaan Klp Bina Keluarga Lansia (BKL)	Watansoppeng	Jumlah anggota kelompok yang mengikuti pelatihan	70 Orang	3.871.100,00	
F	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggara Urusan		Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	794.488.050,00	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggara Urusan		Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	794.488.050,00	
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Watansoppeng	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 kali	66.340.200,00	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Watansoppeng	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 kali	66.340.200,00	Meningkatnya Aktifitas Perkantoran
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Watansoppeng	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	R6 1 Unit R4 4 Unit & R2 58 Unit	19.950.000,00	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Watansoppeng	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	R6 1 Unit R4 4 Unit & R2 58 Unit	19.950.000,00	Banyaknya Kendaraan Roda Dua yang Ganti Plat
3	Penyediaan Layanan kebersihan kantor	Watansoppeng	Jumlah Jenis Peralatan kebersihan dan jumlah petugas kebersihan	1 Orang & 10 Jenis	8.800.000,00	Penyediaan Layanan kebersihan kantor	Watansoppeng	Jumlah Jenis Peralatan kebersihan dan jumlah petugas kebersihan	1 Orang & 10 Jenis	8.800.000,00	
4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Watansoppeng	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan kantor	7 Jenis	1.500.000,00	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Watansoppeng	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan kantor	7 Jenis	1.500.000,00	



Tahun 2020

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROG/KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROG/ KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5	Penyediaan bahan logistik kantor	Watansoppeng	Jumlah pengisian Gas	12 Kali	1.980.000,00	Penyediaan bahan logistik kantor	Watansoppeng	Jumlah pengisian Gas	12 Kali	1.980.000,00	
6	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Di Lokasi rapat	Jumlah rapat koordinas dan konsultasi yang diikuti	200 Kali	160.095.000,00	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Di Lokasi rapat	Jumlah rapat koordinas dan konsultasi yang diikuti	200 Kali	160.095.000,00	Banyaknya Pertemuan-Pertemuan Penting Di BKKBN Perwakilan Provinsi SulSel terkait Pelaksanaan Program KKBPkd Kabupaten Soppeng
7	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Di Lokasi rapat	Jumlah paket pelayanan perkantoran	10 Paket	376.750.000,00	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Di Lokasi rapat	Jumlah paket pelayanan perkantoran	10 Paket	376.750.000,00	
8	Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor	Watansoppeng	Jumlah Website yang dikembangkan	1 Website	-	Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor	Watansoppeng	Jumlah Website yang dikembangkan	1 Website	-	
9	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Watansoppeng	Luas gedung kantor yang terpelihara	270 M2	5.000.000,00	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Watansoppeng	Luas gedung kantor yang terpelihara	270 M2	5.000.000,00	
10	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Watansoppeng	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	66 Unit	157.232.850,00	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Watansoppeng	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	66 Unit	157.232.850,00	
11	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Watansoppeng	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	25 unit	66.340.200,00	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Watansoppeng	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	25 unit	66.340.200,00	
12	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Watansoppeng	Jumlah gedung kantor yang direhab	1 Paket	15.000.000,00	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Watansoppeng	Jumlah gedung kantor yang direhab	1 Paket	15.000.000,00	
13	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan	Di Lokasi Bimtek	Jumlah aparat yang mengikuti bintek	2 Orang	5.970.000,00	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan	Di Lokasi Bimtek	Jumlah aparat yang mengikuti bintek	2 Orang	5.970.000,00	



**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020**

NO	RANCANGAN AWAL RKP					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROG/KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROG/ KEG	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
G	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	100%	12.125.000.00	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah		Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	100%	12.125.000.00	
1	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Watansoppeng	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	6 Dokumen	4.025.000,00	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Watansoppeng	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	6 Dokumen	4.025.000,00	
2	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Watansoppeng	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	6 Dokumen	2.000.000,00	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Watansoppeng	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	6 Dokumen	2.000.000,00	
3	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Watansoppeng	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	6 Dokumen	2.800.000,00	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Watansoppeng	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	6 Dokumen	2.800.000,00	
4	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Watansoppeng	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	4 Dokumen	3.300.000,00	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Watansoppeng	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	4 Dokumen	3.300.000,00	
Total					4.746.358.550.00	Total				4.746.358.550.00	



2.5. Penelaah Usulan Program dan Kegiatan dari Masyarakat

Program dan kegiatan yang masuk dalam rencana kerja SKPD merupakan hasil dari isu-isu strategis yang penting yang terkait dengan penyelenggaraan tugas-tugas dan fungsi SKPD, yang dituangkan dalam bentuk program dan kegiatan yang akan dipergunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan dan sasaran kinerja SKPD. Usulan program kegiatan ini juga berasal dari stakeholder pada saat pelaksanaan forum SKPD renstra yang memasukkan usulan program kegiatan yang sebaiknya dilaksanakan untuk menanggulangi masalah-masalah strategis yang ada.

Usulan yang masuk dalam rancangan awal RKPD diatas adalah sesuai dengan isu startegis yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD diantaranya: isu strategis terkait program KB yaitu masih tingginya angka *unmet need* untuk mengantisipasinya adalah melaksanakan pelayanan KB melalui berbagai momentum, kurang maksimalnya pelaksanaan program KKBPK di lapangan diantisipasi dengan menggiatkan pelaksanaan KIE dan advokasi bagi mitra kerja di Lini Lapangan, masih terjadinya pemikahan usia dini yang dapat diantisipasi dengan pembinaan PIK remaja, Genre, Kader dan anggota Kelompok BKR serta melakukan Advokasi KIE tentang Kesehatan Reproduksi remaja. Sedangkan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yaitu masih rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap kesetaraan dan keadilan gender antara perempuan dan laki-laki di semua aspek kehidupan serta pemenuhan hak anak sehingga tingkat kekerasan terhadap anak dan perempuan dapat dihapuskan.

Tabel 2.5
Review Terhadap Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2020

No	Prog/Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Hasil Review
1	2	3	4	5	6
A	Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender		Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan	98.12%	
1	Pembinaan Organisasi Perempuan	Watansoppeng	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	20 Organisasi	
2	Pendidikan dan Pelatihan peran Serta dan kesetaraan gender	Watansoppeng	Jumlah peserta pelatihan	20 Orang	
3	Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Watansoppeng	Jumlah peserta bimbingan	50 orang	
4	Sosialisasi kebijakan peningkatan peran dan fungsi perempuan di bidang politik dan jabatan public	Watansoppeng	Jumlah peserta sosialisasi	50 orang	
5	Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Watansoppeng	Jumlah peserta workshop	50 peserta	
6	Workshop penyusunan PPRG	Watansoppeng	Jumlah peserta workshop	50 peserta	
7	Penyusunan profil pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Watansoppeng	Jumlah Profil	2 Profil	
8	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Watansoppeng	Jumlah lokus yang dibina	34 lokus	
9	Penyuluhan Ibu Rumah Tangga dalam Membangun Keluarga Sejahtera	Watansoppeng	Jumlah keluarga yang dibina	100 Keluarga	
B	Program Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak		Ratio	0 %	
1	Pertemuan forum anak kabupaten dan pemilihan dewan anak	Watansoppeng	Jumlah peserta forum anak	165 peserta	



Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2020

No	Prog/Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Hasil Review
1	2	3	4	5	6
2	Pembentukan dan pengembangan kota layak anak	Watansoppeng	Jumlah kecamatan ramah anak yang dibangun	2 Kecamatan	
3	Sosialisasi partisipasi anak dalam pembangunan	Watansoppeng	Jumlah peserta sosialisasi	80 peserta	
4	Pelatihan pola asuh anak dalam keluarga dan penghapusan kekerasan terhadap anak	Watansoppeng	Jumlah peserta pelatihan	80 orang	
5	Sosialisasi pencegahan anak dari tindak kekerasan	Watansoppeng	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	80 peserta	
6	Sosialisasi Partisipasi Ibu dalam Perlindungan Anak	Watansoppeng	Jumlah peserta sosialisasi	150 peserta	
7	Pelatihan peningkatan SDM pelayanan dan pendampingan korban tindak kekerasan	Watansoppeng	Jumlah peserta pelatihan	30 orang	
8	Penguatan dan pengembangan kelembagaan P2TP2A	Watansoppeng	Jumlah lembaga yang terlibat dalam penguatan P2TP2A	5 Lembaga	
9	Sosialisasi system pencatatan dan pelaporan KDRT	Watansoppeng	Jumlah peserta sosialisasi	50 peserta	
10	Pembinaan lembaga dan penyedia layanan bagi anak yang berkebutuhan khusus	Watansoppeng	Jumlah lembaga yang berkebutuhan khusus dibangun	4 lembaga	
11	Penguatan Kota Layak Anak (KLA)	Watansoppeng	Jumlah lokus yang dibangun	10 Lokasi	
	Program Pengendalian Penduduk		Total Fertility Rate (TFR)	2.10%	
1	Sosialisasi kajian kebijakan pengendalian penduduk bagi Pengelola Program KB dan Organisasi Kemasyarakatan	Watansoppeng	Peserta Sosialisasi	80 Orang	
2	Pengolahan data dan informasi program KB	Watansoppeng	Jumlah Laporan	24 Laporan	
3	Pelaksanaan rapat kerja daerah program pengendalian penduduk dan KB	Watansoppeng	Jumlah Peserta Rakerda	100 Orang	
4	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan IMP	Watansoppeng	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD yang dibangun	100 Orang	
5	Pemantapan advokasi kepada lembaga Kemasyarakatan dan Klp Keg KKBPK	Watansoppeng	Jumlah Lembaga kemasyarakatan yang diadvokasi	10 Lembaga	
6	Pelaksanaan updating keluarga melalui pendataan keluarga	Watansoppeng	Jumlah desa/kelurahan wilayah pendataan	70 desa/kelurahan	
B	Program KB		Ratio Akseptor KB Aktif & Cakupan PUS yang ber KB	76.50%	
1	Pelayanan KB Momentum Khusus (IBI KB Kes, Bhayangkara, TNI Manunggal, dan PKK) KB Kes	Watansoppeng	Jumlah peserta KB yang dilayani	7.000 Akseptor KB	
2	Pengadaan sarana dan prasarana Penyuluhan dan Pelayanan Keluarga Berencana	Watansoppeng	Jumlah sarana dan prasana KB	15 Paket	
3	Penyediaan Biaya Operasional Program KKBPK (BOKB)	Watansoppeng	Jumlah Balai PLKB yang dibiayai	8 Balai PLKB	
4	Pembinaan Keluarga Berencana	Watansoppeng	Jumlah kegiatan pembinaan KB	1 Keg	
5	Pembentukan dan Pengembangan PIK Remaja/Mahasiswa	Watansoppeng	Jumlah kelompok yang dibangun	2 Klp	
C	Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga		Persentase Anggota Kelompok UPPKS yang ber-KB	91%	
1	Pembinaan dan pengembangan poktan dan UPPKS	Watansoppeng	Jumlah peserta kelompok yang dibangun	13 kelompok	
2	Pembinaan Klp Bina Keluarga Balita (BKB)	Watansoppeng	Jumlah anggota kelompok yang mengikuti pelatihan	70 orang	
3	Pembinaan Klp Bina Keluarga Remaja (BKR)	Watansoppeng	Jumlah anggota kelompok yang mengikuti pelatihan	70 orang	



**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020**

No	Prog/Keg	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/ Volume	Catatan Hasil Review
1	2	3	4	5	6
4	Pembinaan Klp Bina Keluarga Lansia (BKL)	Watansoppeng	Jumlah anggota kelompok yang mengikuti pelatihan	70 orang	
D	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggara Urusan		Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	100%	
1	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Watansoppeng	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	12 kali	
2	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Watansoppeng	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	66 Unit	
3	Penyediaan layanan kebersihan kantor	Watansoppeng	Jumlah jenis peralatan kebersihan dan jumlah petugas kebersihan	1 Orang & 10 Jenis	
4	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Watansoppeng	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan kantor	7 Jenis	
5	Penyediaan bahan logistik kantor	Watansoppeng	Jumlah pengisian Gas	12 Kali	
6	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Di Lokasi rapat	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	303 Kali	
7	Peningkatan pelayanan administrasi perkantoran	Watansoppeng	Jumlah paket pelayanan perkantoran	15 Paket	
8	Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor	Watansoppeng	Jumlah Website yang dikembangkan	1 Website	
9	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Watansoppeng	Luas gedung kantor yang dipelihara	270 M2	
10	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Watansoppeng	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	66 Unit	
11	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Watansoppeng	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	50 Jenis	
12	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	Watansoppeng	Jumlah gedung kantor yang direhab	1 Paket	
13	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan	Di Lokasi Bimtek	Jumlah aparat yang mengikuti bintek	5 Orang	
E	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Watansoppeng	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu	100%	
1	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Watansoppeng	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	6 Dokumen	
2	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Watansoppeng	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	6 Dokumen	
3	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Watansoppeng	Jumlah dokumen pelaporan keuangan	6 Dokumen	
4	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Watansoppeng	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	4 Dokumen	

Usulan-usulan dari para Pemangku kepentingan sebagaimana yang telah dijelaskan pada Tabel 2.5 diatas telah sesuai dengan Tupoksi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, khususnya dalam menyukseskan Program KKBPK (Kependudukan, Keluarga Berencana, dan Pembangunan Keluarga) dan Program Pengarusutamaan Gender (PUG) dan pemenuhan hak anak di Kabupaten Soppeng.



BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Perumusan rencana program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dan mengarah pada pencapaian tujuan dan sasaran Renja, pencapaian Renstra, dan visi dan misi Kabupaten Soppeng yang tertuang dalam RPJMD. Program kerja utama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng sesuai tugas pokok dan fungsi yang mengarah pada pencapaian RPJMD Kabupaten Soppeng adalah:

1. Program Pengendalian Penduduk;
2. Program Keluarga Berencana;
3. Program Keluarga Sejahtera dan Pemberdayaan Keluarga
4. Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesetaraan Gender
5. Program Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak

Indikator kinerja dari kelima program wajib tersebut menjadi tanggung jawab Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng dalam evaluasi RKPD dan LKPJ. Dalam Renja Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng Tahun 2020 terdapat 9 Program dan 37 kegiatan, baik program utama yang merupakan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi dalam mendukung visi dan misi daerah, maupun program dan kegiatan pendukung. Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran.

Untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program. Seluruh kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng yang tertuang dalam Renja didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Nonfisik Bidang Kesehatan Sub Bidang Keluarga Berencana.

Adapun Perumusan kegiatan pada setiap program telah mensinkronisasi peraturan perundangan yang mengatur tentang perencanaan pembangunan daerah dan penganggaran, sedangkan untuk menilai pencapaian kegiatan, maka pada setiap kegiatan dirumuskan indikator kinerja kegiatan. Perumusan kegiatan juga telah diarahkan untuk mendukung pencapaian kinerja pada setiap program.

Seluruh Program dan Kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng yang tertuang dalam Perubahan Renja 2020 ini didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng yang bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Nonfisik Sub Bidang Keluarga Berencana.



4.1 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Soppeng sebagai leading sektor dalam hal urusan kesetaraan gender, pemenuhan hak anak dan Keluarga Berencana di Kabupaten Soppeng melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, selain melaksanakan kegiatan rutin Perangkat Daerah juga melaksanakan urusan wajib.

Program dan kegiatan yang disusun pada tahun 2020 yang dituangkan dalam Perubahan Renja Tahun 2020 disusun sebagai upaya untuk mendukung pemerintah daerah untuk mencapai visi-misi pembangunan daerah. Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai setiap tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan ke dalam program dan kegiatan indikatif yang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi DP3APPKB Kabupaten Soppeng.

Dengan demikian kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis yang merupakan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi organisasi. Kegiatan merupakan aspek operasional dari suatu rencana strategis yang diarahkan untuk memenuhi sasaran, tujuan, visi dan misi organisasi.

a. Faktor – faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan.

Sesuai tujuan dan sasaran Rencana Kerja DP3APPKB Tahun 2020, Program dan Kegiatan Tahun 2020 disusun berdasarkan :

- Pencapaian Visi dan Misi Bupati Soppeng
- Berkorelasi dan bersinergi dengan kebijakan Nasional
- Peningkatan Tugas Pokok dan fungsi kelembagaan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Soppeng.

b. Jumlah Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan DP3APPKB Tahun 2020 direncanakan berjumlah 7 Program dan 52 Kegiatan dengan Total Pagu Dana/Pagu Indikatif sebesar **Rp 4.736.358.550,00** yang bersumber dari Dana Alokasi Khusus sebesar Rp 3.827.604.000,00, dan Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Rp 908.754.550,00

c. Sifat Penyebaran Lokasi Program dan Kegiatan

Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan dilihat berdasarkan program yang akan dilaksanakan di 8 (Delapan) Kecamatan pada Tahun 2020.

d. Total kebutuhan dana/pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya.

Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif DP3APPKB bersumber dari Dana Alokasi Umum (DAU) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Soppeng dan Dana Alokasi Khusus Fisik dan Non Fisik.

e. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan RKPD

Seperti yang telah dijelaskan pada Bab II, terhadap program dan kegiatan tidak ada perbedaan dengan RKPD.



Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020

Secara umum program dan kegiatan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana kabupaten Soppeng pada tahun 2020 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 4.1
Perubahan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2020 dan Prakiraan Maju Tahun 2021

Kode	Urusan Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Inikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.02.2.02.01.01	Program Pemberdayaan Perempuan dan Kesenjangan Gender	Persentase partisipasi angkatan kerja perempuan		98.00%	84.638.200.00	79.262.500.00		11.25%	330.000.000
2.02.2.02.01.01.01	Pembinaan Organisasi Perempuan	Jumlah organisasi perempuan yang dibina	Watansoppeng	20 organisasi	5.270.000.00	-		20 organisasi	29.221.000.00
2.02.2.02.01.01.02	Pendidikan dan Pelatihan Peningkatan peran serta dan kesetaraan gender	Jumlah peserta pelatihan	Watansoppeng	20 orang	28.341.600.00	-		40 orang	86.683.200.00
2.02.2.02.01.01.03	Bimbingan manajemen usaha bagi perempuan dalam mengelola usaha	Jumlah kelompok usaha yang mendapatkan bimbingan	Watansoppeng	50 orang	3.420.000.00	3.420.000.00		100 orang	19.697.100.00
2.02.2.02.01.01.05	Sosialisasi kebijakan peningkatan peran dan fungsi perempuan di bidang politik dan jabatan publik	Jumlah peserta sosialisasi	Watansoppeng	50 orang	3.520.000.00	-		200 orang	35.821.100.00
2.02.2.02.01.01.08	Workshop peningkatan peran perempuan dalam pengambilan keputusan	Jumlah peserta workshop	Watansoppeng	50 peserta	3.520.000.00	3.520.000.00		100 peserta	19.640.000.00
2.02.2.02.01.01.09	Workshop penyusunan PPRG	Jumlah peserta workshop	Watansoppeng	75 peserta	7.720.000.00	-		0 peserta	-
2.02.2.02.01.01.11	Penyusunan profil pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak	Jumlah profil	Watansoppeng	2 dokumen	6.800.000.00	6.800.000.00		2 dokumen	22.064.500.00



**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020**

Kode	Urusan Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Inikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.02.2.02.01.01.12	Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak	Jumlah lokus yang dibina	Watansoppeng	34 lokus	8.620.000.00	4.475.000.00		38 lokus	29.414.000.00
2.02.2.02.01.01.13	Penyuluhan ibu rumah tangga dalam membangun keluarga sejahtera	Jumlah keluargayang dibina	Watansoppeng	100 Keluarga	17.426.600.00	5.566.600.00		100 keluarga	55.226.600.00
2.02.2.02.01.02	Program Peningkatan Kualitas Keluarga dan Perlindungan Anak	Ratio KDRT		0.030%	54.910.000.00	282.365.000.00		0.028%	350.000.000.00
2.02.2.02.01.02.03	Pertemuan Forum Anak kabupaten dan pemilihan dewan anak	Jumlah peserta forum anak	Watansoppeng	165 peserta	13.365.000.00	11.365.000.00		165 peserta	52.771.200.00
2.02.2.02.01.02.04	Pembentukan dan pengembangan kota layak anak	Jumlah kecamatan ramah anak yang dibina	Watansoppeng	2 kecamatan	6.040.000.00	-		8 kecamatan	26.042.200.00
2.02.2.02.01.02.05	Sosialisasi partisipasi anak dalam pembangunan	Jumlah peserta sosialisasi	Watansoppeng	100 peserta	4.220.000.00	-		100 peserta	15.092.000.00
2.02.2.02.01.02.06	Pelatihan pola asuh anak dalam keluarga dan penghapusan kekerasan terhadap anak	Jumlah peserta pelatihan	Watansoppeng	100 orang	4.220.000.00	-		200 orang	39.592.200.00
2.02.2.02.01.02.08	Sosialisasi pencegahan anak dari tindak kekerasan	Jumlah peserta yang mengikuti sosialisasi	Watansoppeng	100 peserta	3.020.000.00	-		400 peserta	57.755.500.00
2.02.2.02.01.02.09	Sosialisasi partisipasi ibu dalam perlindungan anak	Jumlah peserta sosialisasi	Watansoppeng	200 peserta	5.470.000.00	-		400 peserta	52.240.000.00
2.02.2.02.01.02.10	Pelatihan peningkatan SDM pelayanan dan pendampingan korban	Jumlah peserta pelatihan	Watansoppeng	30 orang	2.895.000.00	-		30 orang	19.896.100.00



**Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020**

Kode	Urusan Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Inikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	tindak kekerasan								
2.02.2.02.01.02.11	Penguatan dan pengembangan kelembagaan P2TP2A	Jumlah lembaga yang terlibat dalam penguatan p2tp2a	Watansoppeng	5 Lembaga	4.220.000,00	-		5 Lembaga	15.000.000,00
2.02.2.02.01.02.12	Sosialisasi system pencatatan dan pelaporan KDRT	Jumlah peserta sosialisasi	Watansoppeng	50 peserta	2.145.000,00	-		50 peserta	14.621.000,00
2.02.2.02.01.02.13	Pembinaan lembaga dan penyedia layanan bagi anak yang berkebutuhan khusus	Jumlah lembaga yang berkebutuhan khusus	Watansoppeng	4 Lembaga	4.395.000,00	-		4 lembaga	6.990.000,00
2.02.2.02.01.02.14	Penguatan Kota Layak Anak (KLA)	Jumlah lokus yang dibina	Watansoppeng	10 lokasi	4.920.000,00	4.920.000,00		40 lokasi	49.990.800,00
2.08.2.01.01.01	Program Pengendalian Penduduk		Total Fertility Rate (TFR)	2.10%	39.874.400,00	39.874.100,00			90.000.000,00
2.08.2.01.01.01.02	Sosialisasi kajian kebijakan pengendalian penduduk bagi Pengelola Program KB dan Organisasi Kemasyarakatan	Watansoppeng	Peserta Sosialisasi	100 Orang	4.221.100,00	-		100 Orang	14.567.800,00
2.08.2.02.01.01.04	Pengolahan data dan informasi program KB	Watansoppeng	Jumlah laporan	24 Laporan	10.440.000,00	10.440.000,00		24 Laporan	10.000.000,00
2.08.2.02.01.01.05	Pelaksanaan Rapat Kerja Daerah program pengendalian penduduk dan KB	Jumlah peserta rakerda	Watansoppeng	200 orang	4.921.100,00	-		200 orang	22.821.100,00
2.08.2.02.01.01.06	Pembinaan dan Penguatan Kelembagaan IMP	Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD	Watansoppeng	100 orang	3.721.100,00	-		210 orang	40.000.000,00
2.08.2.02.01.01.07	Pemantapan advokasi kepada Lembaga Kemasyarakatan dan Klp Keg KKBPK	Jumlah lembaga kemasyarakatan yang diadvokasi	Watansoppeng	10 lembaga	4.921.100,00	-		10 lembaga	15.000.000,00



Tahun 2020

Kode	Urusan Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Inikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.2.02.01.03.09	Pembinaan Klp Bina Keluarga Lansia (BKL)	Jumlah anggota kelompok yang mengikuti pelatihan	Watansoppeng	70 Orang	3.871.100,00	3.871.100,00		70 Orang	25.000.000,00
2.08.2.02.01.03.10	Pembinaan Klp Bina Keluarga Remaja (BKR)	Jumlah anggota kelompok yang mengikuti pelatihan	Watansoppeng	30 Orang	3.871.100,00	2.471.100,00		70 Orang	30.000.000,00
2.08.2.02.01.05	Program Pemenuhan Pendukung Penyelenggara Urusan	Persentase Pemenuhan Kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran		100%	871.053.050,00	1.100.784.673,00			780.116.844,00
2.08.2.02.01.05.01	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Jumlah pembayaran jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	Watansoppeng	12 kali	66.340.200,00	66.340.200,00	Meningkatnya Aktifitas Perkantoran	12 kali	43.270.000,00
2.08.2.02.01.05.03	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas operasional	Jumlah STNK kendaraan dinas/operasional	Watansoppeng	66 unit	19.950.000,00	19.950.000,00	Banyaknya Kendaraan Roda Dua yang Ganti Plat	4 unit	4.900.000,00
2.08.2.02.01.05.05	Penyediaan jasa kebersihan kantor	Jumlah petugas kebersihan dan jumlah peralatan kebersihan	Watansoppeng	1 Orang & 10 Jenis	8.800.000,00	8.800.000,00		1 Orang & 10 jenis	12.826.000,00
2.08.2.02.01.05.06	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	Jumlah alat listrik/penerangan bangunan kantor	Watansoppeng	7 Jenis	1.500.000,00	1.500.000,00		3 Jenis	2.282.365,00
2.08.2.02.01.05.09	Penyediaan bahan logistik kantor	Jumlah pengisian Gas	Watansoppeng	12 Kali	1.980.000,00	1.980.000,00		12 Kali	2.615.000,00

Kode	Urusan Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Inikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.08.2.02.01.05.10	Rapat rapat koordinasi dan konsultasi dalam dan luar daerah	Jumlah rapat koordinasi dan konsultasi yang diikuti	Di lokasi rapat	200 Kali	180.000.000,00	160.095.000,00	Banyaknya Pertemuan-Pertemuan Penting Di BKKBN Perwakilan Provinsi Sulsel terkait Pelaksanaan Program KKBPkd Kabupaten Soppeng	200 Kali	392.497.000,00
2.08.2.02.01.05.11	Peningkatan pelayanan perkantoran	Jumlah paket pelayanan perkantoran	Watansoppeng	10 Paket	384.250.000,00	376.750.000,00	Penambahan Makan Minum Harian Pegawai	15 Paket	312.321.100,00
2.08.2.02.01.05.18	Pengelolaan Halaman Website Dinas/Badan/Kantor	Jumlah website yang dikembangkan	Watansoppeng	1 website	1.000.000,00	-		10 website	11.000.000,00
2.08.2.02.01.05.34	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Luas gedung kantor yang dipelihara	Watansoppeng	270 meter persegi	5.000.000,00	95.071.500,00	Kebutuhan Mendesak Belanja Printer Bendahara dan Lemari Arsip	270 meter persegi	10.000.000,00
2.08.2.02.01.05.36	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas operasional	Jumlah kendaraan dinas/operasional yang dipelihara	Watansoppeng	66 unit	157.232.850,00	127.352.850,00	Ganti Suku Cadang Bus Antar jemput Akseptor KB	4 Unit	75.301.750,00
2.08.2.02.01.05.40	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Jumlah peralatan gedung kantor yang dipelihara	Watansoppeng	24 Unit	10.000.000,00	5.750.000,00	Pemeliharaan Berkala Komputer	26 Unit	18.755.000,00
2.08.2.02.01.05.46	Rehabilitasi sedang/berat gedung, kantor	Jumlah gedung kantor yang direhab	Watansoppeng	1 paket	15.000.000,00	15.000.000,00	Pemeliharaan Berkala Komputer	1 paket	15.000.000,00
2.08.2.02.01.05.63	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundangundangan	Jumlah aparat yang mengikuti bintek	Di lokasi Bimtek	2 Orang	20.000.000,00	5.970.000,00		6 Orang	50.000.000,00

Kode	Urusan Bidang urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan	Rencana Tahun 2020				Catatan Penting	Perkiraan Maju Rencana Tahun 2021	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Pagu Sebelum Perubahan	Pagu Setelah Perubahan		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Inikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.02.2.02.01.06	Program Perencanaan, Penganggaran, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah	Persentase penyusunan laporan capaian kinerja dan keuangan tepat waktu		100%	17.025.000,00	29.500.000,00			23.000.000,00
2.02.2.02.01.06.10	Penyusunan dokumen perencanaan dan penganggaran	Jumlah dokumen perencanaan dan penganggaran	Watansoppeng	6 Dokumen	6.125.000,00	4.025.000,00		3 Dokumen	12.000.000,00
2.02.2.02.01.06.11	Penyusunan dokumen pelaporan kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	Watansoppeng	6 Dokumen	2.000.000,00	2.800.000,00		5 Dokumen	17.000.000,00
2.02.2.02.01.06.12	Penyusunan dokumen pelaporan keuangan	Jumlah laporan keuangan	Watansoppeng	6 Dokumen	2.800.000,00	2.800.000,00		1 Dokumen	12.000.000,00
2.02.2.02.01.06.13	Penyusunan dokumen pengendalian dan evaluasi	Jumlah dokumen pengendalian dan evaluasi	Watansoppeng	4 Dokumen	6.100.000,00	3.300.000,00		3 Dokumen	12.000.000,00
					1.192.000.000,00	4.769.025.057,00			2.875.666.844,00



PERUBAHAN RENCANA KERJA

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2020

mendukung menyukseskan Pelaksanaan Program Pengarusutamaan gender dan perlindungan anak dan Program Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga (KKBPK).

Dalam Penyusunan rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang jelas, transparan dan akuntabel yang mampu mendorong aparat pemerintah untuk selalu meningkatkan kinerja dalam upaya pencapaian tujuan dari pembangunan yang lebih efektif dan efisien. Kritik dan saran yang membangun dari berbagai pihak sangat kami harapkan demi perbaikan perencanaan dan penyusunan Rencana Kerja ke depan.

Watansoppeng, Juli 2020

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
PERLINDUNGAN ANAK PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN SOPPENG**



Hj. A. HUSNIATI, S.Sos, MM
Nip. 19690227 199209 2 001